



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG : EKSEKUTIF**

**LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**

**UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **MUKTAROM**
2. Jabatan : **KEPALA KANTOR**
3. NHK : **484885**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 1.561.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/60 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 605.000.000
2. Tanah Seluas 7.500 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 83.000.000
3. Tanah Seluas 10.000 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA PUSAT , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
5. Tanah Seluas 40.744 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 27.113 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 20.860 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
8. Tanah Seluas 24.030 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
9. Tanah Seluas 24.750 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
10. Tanah Seluas 14.060 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
11. Tanah Seluas 24.010 m2 di KAB / KOTA BERAU, HASIL SENDIRI



Rp. 60.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp.

30.000.000

1. MOTOR, KAWASAKI EX250M Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

30.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp.

11.560.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp.

----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp.

181.878.587

**F. HARTA LAINNYA**

Rp.

----

Sub Total

Rp.

1.784.438.587

**III. HUTANG**

Rp.

1.767.278.678

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

17.159.909

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.